

DAMPAK KRISIS MONETER DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TERHADAP DAYA SAING AGRIBISNIS AYAM RAS PEDAGING DI JAWA BARAT

SAPTANA dan I WAYAN RUSASTRA¹

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Deptanhut., Bogor

ABSTRACT

Monetary and economic crisis started on the mid of 1997 has negative impact on the performance and sustainability of poultry industry in this country. The main problem faced by broiler industry, namely: (1) Most of feed stuff are highly dependent on import; (2) The structure of input and output market are oligopolistic in nature; (3) Cooperative farming is not consistently implemented; and (4) The price of input factor increased threefold due to monetary and economic crisis. Based on those backgrounds, the objective of this study is to analysis the impact of government policy on financial and economic feasibilities of broiler agribusiness. The finding of the respective study conducted in two district (Bogor and Tasikmalaya) indicated that: (1) Because of economic crisis, financial and economic profitability of broiler industry decreases; (2) Private Cost Ratio (PCR) increased from 0,753 – 0,873 to 0,851 – 0,989 due to crisis, indicating lower financial competitiveness; (3) The value of DRCCR before and after crisis are 0,727 – 0,976 vs. 0,790 vs. 0,917 which reveal lower economic competitiveness; and (4) The value of Nominal Protection Coefficient (NPC) during the economic crisis showed that broiler industry experiencing disincentive for both input and output market. The implication of this study in relation with the development of broiler industry facing the economic globalization are as follows: (1) The vertical integration and cooperation between smallholder broiler farming and input/output industry should be strengthening in synergistic manner; (2) In order to generate foreign exchange and higher value added through export and product development as well as product differentiation, vertical integration for all agribusiness subsystem in broiler industry should be implemented; and (3) The establishment of cooperative broiler farming system should be conducted in the region of potential market and feed stuff producing regions.

Keywords: Monetary Crisis, Competitiveness, Government Policy, and Broiler Agribusiness

¹ Masing-masing adalah Peneliti Muda dan Ahli Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor

² Ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. Rudolf Sinaga, Dr. Bonar M. Sinaga dan Dr. Erwidodo yang telah memberikan masukan dan pengkayaan terhadap tulisan ini.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ternak unggas merupakan salah satu komoditas subsektor peternakan yang sejak tahun 1972 mengalami pertumbuhan relatif cepat hingga tahun 1997. Pertumbuhan tersebut didorong oleh adanya perkembangan yang kuat dari sektor industri hulu (pabrik pakan, pembibitan dan industri farmasi) dan industri hilir yang meliputi rumah potong ayam, restoran dan lain-lain. Para ahli menyatakan bahwa industri unggas nasional telah mampu swasembada dalam menyediakan telur dan daging unggas sejak tahun 1993.

Kegiatan usaha yang menarik dikaji di subsektor peternakan adalah usaha agribisnis ayam ras pedaging. Hal ini dilandasi beberapa argumen, yaitu: (1) pada periode 1986-1995, produksi daging asal unggas didominasi oleh daging ayam ras, dengan pangsa 61,16 persen dari total daging unggas; (2) periode siklus produksinya yang relatif pendek sehingga perputaran modal relatif cepat, sehingga cocok untuk usaha peternakan rakyat; (3) usaha ayam ras pedaging mempunyai kaitan yang luas baik kaitan kebelakang (*backward linkage*) dan kaitan kedepan (*forward linkage*); (4) kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja secara ekstensif; dan (5) sebagai salah satu komoditas yang mempunyai potensi ekspor.

Akhir-akhir ini usaha agribisnis ayam ras pedaging menghadapi permasalahan sangat berat dan mengancam keberlanjutannya sebagai akibat terjadinya krisis moneter dan ekonomi. Beberapa permasalahan utama dalam agribisnis ayam ras pedaging adalah : (1) Penyediaan bahan baku pakan yang sebagian besar mengalami ketergantungan impor tinggi, seperti jagung mencapai 40-50 persen; bungkil kedelai 95 persen; tepung ikan 90-92 persen; tepung tulang dan vitamin/feed additive hampir 100 persen impor; (2) Adanya indikasi terjadinya ketimpangan struktur pasar, baik pada pasar input (saproak) maupun pasar output (daging) yang sekarang sudah dalam bentuk struktur pasar yang oligopolistik; (3) Kemitraan usaha tidak dijalankan secara konsisten, yang seharusnya bersifat saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, hal yang terjadi justru sebaliknya, timbul eksploitasi dari yang kuat kepada yang lemah; dan (4) Krisis moneter dan ekonomi telah menyebabkan keterpurukan industri ayam ras pedaging, karena terjadinya peningkatan harga saproak khususnya pakan menjadi hampir tiga kali lipat dari harga sebelum krisis.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan paper ini adalah untuk menganalisis ayam ras pedaging sebelum dan sesudah krisis ekonomi yang meliputi :

1. Kinerja agribisnis dan tingkat profitabilitas agribisnis ayam ras pedaging;

2. Efisiensi finansial dan ekonomik agribisnis ayam pedaging secara finansial pada berbagai pola pengusahaan dan skala usaha;
3. Dampak kebijaksanaan pemerintah terhadap penggunaan masukan domestik dan *tradeable* serta kinerja produksi ayam ras pedaging.

KERANGKA PEMIKIRAN

Daya saing adalah kemampuan produsen memproduksi suatu komoditi dengan mutu yang baik dan biaya yang cukup rendah sesuai harga di pasar internasional, dapat dipasarkan dengan laba yang cukup dan dapat melanjutkan kegiatan produksi atau usahanya (Simanjuntak, 1992). Artinya, apakah biaya produksi riil yang terdiri dari pemakaian sumberdaya domestik cukup rendah sehingga harga jualnya dalam rupiah dibandingkan harga yang terbentuk di pasar dunia cukup kompetitif.

Komoditas ternak ayam ras pedaging adalah barang yang diperdagangkan (*tradable goods*), maka ada dua kriteria yang dipakai, yaitu: (1) layak secara ekonomik; dan (2) layak secara finansial. Kelayakan ekonomik merupakan syarat agar usaha agribisnis ayam ras pedaging efisien bagi masyarakat secara keseluruhan, sementara itu kelayakan finansial efisien bagi lembaga atau individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut (Kadariah, dkk., 1978).

Menurut Simatupang (1991); Sudaryanto dan Simatupang (1993), konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing potensial apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. Simatupang (1993) mengemukakan bahwa konsep yang lebih cocok untuk mengukur kelayakan finansial adalah keunggulan kompetitif atau sering disebut "*revealed competitive advantage*" yang merupakan pengukur daya saing kegiatan pada kondisi perekonomian aktual.

Selain biaya produksi riil daya saing suatu komoditas juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah. Hal ini disebabkan untuk mencapai perekonomian yang kompetitif sempurna, dimana alokasi sumberdaya optimal dan produksi barang dan jasa maksimum, dalam kenyataannya sulit terwujud (Samuelson and Nordhaus, 1993). Dalam prakteknya, perekonomian seringkali mengalami distorsi struktur pasar (monopoli atau oligopoli), distorsi karena faktor kebijakan pemerintah, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Untuk menghadapi kelemahan mekanisme pasar tersebut, banyak negara menerapkan kebijaksanaan melalui campur tangan pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah berpengaruh pada tingkat harga input- output, dapat berupa subsidi/pajak, tarif, kebijakan upah tenaga kerja dan fiskal/moneter.

Kebijaksanaan pemerintah di bidang perunggasan menuju ke arah berjalannya mekanisme pasar. Sebagai ilustrasi tarif bea masuk jagung, bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, dedak/bekatul dan tepung ikan yang sebesar 5 – 10,5 persen pada periode 1989-1994, pada tahun 1998 telah dihapuskan, kecuali dedak/bekatul yang masih dikenakan tarif bea masuk sebesar 5 persen. Sementara itu tarif bea masuk untuk ayam, daging dan telur dari 15 – 30 persen (1989-1994) telah diturunkan menjadi 5 – 10 persen (1998). Berbagai kebijakan tersebut berpengaruh terhadap struktur pasar input dan output menuju bekerjanya mekanisme pasar dan berguna untuk menjustifikasi penetapan harga sosial.

Kerangka pemikiran sistem komoditas daging ayam ras dan komponen yang menentukan daya saing terlihat pada Gambar 1,

METODOLOGI

Lokasi Penelitian dan Metoda Penarikan Contoh

Penelitian dilakukan di propinsi Jawa Barat dengan dua kabupaten contoh, yaitu Kabupaten Bogor dan Tasikmalaya. Kabupaten Bogor mewakili daerah sentra produksi yang berdekatan dengan tujuan pasar utama Jakarta dengan skala usaha yang relatif besar, sedangkan Kabupaten Tasikmalaya mewakili daerah sentra produksi yang jauh dari tujuan pasar utama Jakarta dengan skala usaha yang relatif kecil.

Dalam pengambilan contoh dilakukan klasifikasi berdasarkan pola pengusahaan (pola KINAK PRA/PIR Kesepakatan, pola KINAK PIR, pola Mandiri dan pola Kontrak Kandang) dan skala usaha. Mengingat unit analisis adalah agribisnis ayam ras pedaging, maka digali informasi dari berbagai pelaku tataniaga, baik input maupun output, rumah potong ayam (RPA) dengan mengikuti aliran komoditas. Metode pengambilan contoh dilakukan dengan cara proporsional acak terstratifikasi (*proportional stratified random sampling*). Secara terperinci sebaran responden contoh disajikan pada Tabel 1,

Tabel 1, Sebaran Responden Pelaku Agribisnis Ayam Ras Pedaging di Kabupaten Bogor dan Tasikmalaya, 1998

Uraian	Kabupaten Bogor	Kabupaten Tasikmalaya
1, Peternak ayam ras pedaging		
- Pola KINAK PRA	10	15
- Pola KINAK PIR	10	-
- Pola Mandiri	6	-
- Pola Kontrak Kandang	6	15
2. Pedagang sapronak/poultry shop	4	4
3. Pedagang ayam atau daging ayam	2	2
4. Pemotongan ayam	2	2
Jumlah	40	38

Metode dan Analisis Data

Harga bayangan menggunakan penyesuaian seperti dilakukan Gittinger (1976 dan 1986). Penentuan harga bayangan dengan mengeluarkan distorsi akibat kebijakan pemerintah atau akibat kegagalan pasar. Dalam penelitian ini untuk menentukan harga sosial komoditas yang diperdagangkan didekati dengan harga batas (*border price*). Untuk komoditas yang selama ini diekspor digunakan harga f.o.b (*free on board*) dan untuk komoditas yang diimpor digunakan harga cif (*cost insurance freight*). Mengingat bahwa analisis PAM ini ditujukan untuk menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif sampai dengan tingkat pedagang besar (*wholesale*) maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Untuk harga fob, karena merupakan harga batas di pelabuhan ekspor perlu dikurangi biaya transport dan handling dari pedagang besar ke pelabuhan Tanjung Priok. Sementara itu untuk harga cif, karena merupakan harga batas di pelabuhan impor, maka perlu ditambah biaya transport dan handling dari pelabuhan Tanjung Priok ke pedagang besar.

Menurut Pearson et al. (1976) dalam Haryono (1991), ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengalokasikan biaya kedalam komponen domestik dan asing, yaitu pendekatan total dan pendekatan langsung. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan total. Pendekatan total diasumsikan bahwa setiap biaya dari input *tradable* produksi domestik dibagi kedalam komponen biaya domestik dan asing. Pendekatan total lebih tepat digunakan apabila produsen lokal dilindungi sehingga tambahan penawaran input *tradable* datang dari produksi domestik. Pendekatan total lebih sesuai digunakan dalam analisis dampak kebijaksanaan atau untuk memperkirakan biaya ekonomi atau sosial dari struktur proteksi yang dilakukan pemerintah.

Penelitian ini adalah untuk melihat dampak krisis moneter dan kebijaksanaan pemerintah terhadap profitabilitas dan daya saing agribisnis ayam ras pedaging, maka digunakan pendekatan total. Hal ini dilandasi oleh beberapa argumen: (1) Analisis yang dilakukan adalah analisis dampak krisis moneter dan kebijaksanaan pemerintah; dan (2) Masih adanya proteksi terhadap produsen domestik baik pembibitan, pabrik pakan dan produsen bahan baku penyusun pakan. Hasil alokasi biaya kedalam komponen domestik dan asing pada sistem komoditi ayam ras pedaging di Jawa Barat disajikan pada Tabel 2.

Analisis daya saing mencakup dua dimensi yaitu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Disamping itu akan dilakukan analisis dampak kebijaksanaan pemerintah terhadap sistem komoditas tersebut. Alat analisis yang akan digunakan adalah *Policy Analysis Matrix* (PAM) yang dikembangkan oleh Monke dan Person (1989; 1995).

Tabel 2. Alokasi Biaya ke dalam Komponen Domestik dan Asing, pada Sistem Komoditi Ayam Ras Pedaging di Jawa Barat, 1998

Biaya	Domesik (%)	Asing (%)
A. 1. Anak ayam (DOC)	35,00	65,00
2. Pakan ayam ras	51,21	48,79
3. Obat-obatan, vitamin & mineral	20,00	80,00
4. Listrik	50,00	50,00
5. Pemanas (kerosen)	100,00	0,00
6. Alas kandang (sekam)	100,00	0,00
7. Tenaga kerja	100,00	0,00
8. Karyawan/pegawai	100,00	0,00
9. Penyusutan kandang & alat	50,00	50,00
10. Bunga modal	100,00	0,00
11. Sewa lahan	100,00	0,00
12. Sewa kandang	100,00	0,00
B. 1. Transport/pengangkutan	45,53	54,57
2. Pematangan	50,00	50,00
3. Penanganan	82,81	17,19

Catatan :
DOC = Day Of Chiken

Indikator daya saing meliputi: (1) PCR (*Private Cost Ratio*) atau (rasio biaya privat) dan (2) DRCCR (*Domestic Resource Cost Ratio*) atau BSD (Biaya imbalan sumberdaya domestik). Rasio biaya privat adalah rasio biaya domestik terhadap nilai tambah dalam harga privat. Nilai PCR mencerminkan efisiensi finansial. Apabila nilai PCR < 1 dan makin kecil, maka aktivitas ekonomi efisien secara finansial dan kemampuan itu meningkat. Rasio biaya sumberdaya domestik merupakan indikator kemampuan sistem komoditas membiayai biaya faktor domestik pada harga sosial. Apabila DRCCR < 1 dan makin kecil, maka aktivitas ekonomi efisien secara ekonomik dalam pemanfaatan sumberdaya domestik untuk menghemat satu-satuan devisa dan kemampuannya meningkat. Sebaliknya DRCCR > 1, maka permintaan domestik lebih menguntungkan dengan melakukan impor.

Analisis keunggulan komparatif dan kompetitif dinamis (*dynamics comparative advantage and competitive advantage*) akan dibuat dengan melakukan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif statis (*statics comparative advantage and competitive advantage*) untuk dua titik waktu yaitu kondisi sebelum dan sesudah krisis moneter. Perubahan profitabilitas dan daya saing usaha agribisnis ayam ras petelur dan pedaging pada berbagai pola perusahaan, skala usaha dan lokasi dapat dilihat dari satu titik waktu ke titik waktu lainnya. Di samping itu juga akan dilakukan analisis sensitivitas pada situasi setelah terjadi krisis untuk perubahan harga daging ayam ras, harga pakan ternak, dan perubahan kedua faktor tersebut secara simultan.

Secara terperinci beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam analisis PAM pada penelitian ini adalah : (1) Perhitungan berdasarkan harga privat, untuk analisis finansial; (2) Perhitungan berdasarkan harga sosial (bayangan), untuk analisis ekonomi; (3) Output bersifat *tradable* dan input dapat dipisahkan kedalam komponen asing dan domestik; (4) Eksternalitas positif dan negatif dianggap saling meniadakan dengan demikian dianggap nol; dan (5) Pada semua pola usaha ternak yang diteliti diasumsikan merupakan usaha agribisnis yang terintegrasi dari kegiatan budidaya, pemotongan dan pemasarannya dalam satu kesatuan manajemen.

Pada dasarnya langkah perhitungan PAM terdiri atas empat tahap: (1) penentuan masukan-keluaran fisik secara lengkap dari aktivitas ekonomi yang akan dianalisis; (2) penaksiran harga bayangan (*shadow price*) dari masukan dan keluaran; (3) pemisahan seluruh biaya kedalam komponen domestik dan asing, serta menghitung besarnya penerimaan, dan (4) menghitung dan menganalisis berbagai indikator yang bisa dihasilkan oleh PAM. Guna menganalisis daya saing dan dampak kebijaksanaan pemerintah digunakan alat analisis *Policy Analysis Matrix*, seperti pada Tabel 3.

Beberapa indikator yang dapat diperoleh dari penggunaan PAM adalah sebagai berikut : (1) Keuntungan Privat (PP): $PP = \text{penerimaan privat (A)} - \text{biaya tradable privat (B)} - \text{biaya input non tradable privat (tradeable C)}$; (2) Keuntungan sosial (SP): $SP = \text{penerimaan sosial (E)} - \text{biaya input tradable sosial (F)} - \text{biaya input non tradable sosial (G)}$; (3) Transfer output (OT) = $A - E$; (4) Transfer input (IT) = $B - F$; (5) Transfer faktor (FT) = $C - G$; (6) Transfer bersih (NT) = $\text{Keuntungan privat (D)} - \text{Keuntungan sosial (H)}$; (7) Rasio biaya privat (PCR) = $C : (A - B)$; (8) Rasio biaya sumberdaya domestik (DRCR) = $G : (E - F)$; (9) Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) = $A:E$; (10) Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) = $B : F$; (11) Koefisien Proteksi Efektif (EFC) = $(A-B) : (E-F)$; (12) Koefisien keuntungan = $(D : H)$; (13) Rasio Subsidi bagi produsen (SRP) = $(L : E)$.

Tabel 3. Matrik Analisis Kebijakan (Policy Analysis Matrix, PAM)

	Penerimaan	Input Tradable	Input Domestik	Keuntungan
Harga privat (finansial)	A	B	C	D ¹
Harga sosial (bayangan)	E	F	G	H ²
Dampak kebijakan	I ³	J ⁴	K ⁵	L ⁶

Sumber: Monke dan Person, 1989

Keterangan:

1. Keuntungan privat, $D = A - B - C$
2. Keuntungan sosial, $H = E - F - G$
3. Transfer output, $I = A - E$

4. Transfer input, untuk input tradable, $J = B - F$
5. Transfer faktor, untuk input non tradable, $K = C - G$
6. Transfer bersih, $L = D - H$ atau $I - J - K$

KINERJA AGRIBISNIS AYAM RAS PEDAGING DI JAWA BARAT

Struktur Biaya Usahaternak Ayam Ras

Untuk peternakan ayam ras biaya tetap tergantung pada jumlah investasi untuk kandang, tanah, dan peralatan. Sedangkan biaya variabel meliputi bibit (doc), ransum, obat-obatan dan vaksin, makanan tambahan (*feed suplemen*), tenaga kerja dan biaya-biaya lain yang habis dipakai dalam satu periode proses produksi (Soeprawiro, 1980).

Clayton (1967) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa 66.00 persen dari biaya produksi ayam ras pedaging adalah untuk ransum; 24.00 untuk biaya bibit. 6.00 persen untuk obat-obatan, vaksin dan *feed suplemen*; serta 4.00 persen untuk biaya tenaga kerja. Selanjutnya Siregar dkk (1980) mengemukakan hasil yang hampir sama, yaitu: 60,00 persen untuk ransum; 20,00 persen untuk bibit; 5.00 persen untuk biaya obat-obatan, vaksin dan *feed suplemen*; 5.00 persen untuk biaya tenaga kerja dan 10,00 persen untuk biaya depresiasi dan lain-lain.

Sudaryani (1981) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa 61,84 persen dari biaya produksi ayam ras pedaging adalah untuk ransum; 30,33 persen untuk biaya bibit; 1,96 persen biaya obat-obatan dan vaksin; serta 1,45 persen untuk tenaga kerja. Selanjutnya Hanjali (1982) mengemukakan komposisi biaya dari hasil penelitiannya di Perusahaan Peternakan Broleka di Ciawi Bogor sebagai berikut: biaya ransum 56.35 persen, bibit (doc) 32.26 persen, tenaga kerja 5.95 persen, dan biaya lainnya sebesar 5.44 persen.

Hasil penelitian Saptana (1987); Saptana dan Sri Hastuti (1995) menunjukkan bahwa proporsi biaya ransum usahaternak ayam ras pedaging terhadap total biaya bervariasi menurut lokasi dan pola pengembangan. Di Jawa proporsinya mencapai 57,21 persen, di Sumatera 55,60 persen; dan di Cimanggis sebesar 66.55 persen. Proporsi biaya ransum terhadap total biaya untuk pola KINAK PRA di Bogor adalah 59,42 persen, KINAK PIR di Bogor 62,76 persen, pola KINAK PRA di Tasikmalaya 59,89 persen, KINAK PRA di Ciamis 60,52 persen dan pola KINAK PRA di Lampung sebesar 57,14 persen.

Perkembangan Populasi, Produksi dan Konsumsi

Pada periode Pelita IV hingga Pelita VI (1984-1997), populasi ayam ras pedaging mengalami peningkatan dari 4.170,000 ekor (1984) menjadi 20,850,083 ekor (1997), atau meningkat sebesar 14,55 persen pertahun.

Pada sisi produksi, memberikan gambaran yang relatif sama. Pada periode (1984-1997), produksi daging ayam ras (broiler) meningkat dari 20,640,890 kg (1984) menjadi 149.166.020 kg (1997) atau meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 15,92 persen pertahun.

Perkembangan konsumsi produk daging untuk Jawa Barat mengalami peningkatan. Total konsumsi daging meningkat dari 197.965 ton (1995) menjadi 215.579 ton (1997) atau meningkat sebesar 4,51 persen pertahun. Konsumsi daging perkapita meningkat dari 5,06 kg perkapita pertahun (1995) menjadi 5,40 kg perkapita pertahun (1997).

Berdasarkan perkembangan populasi, produksi dan konsumsi, merefleksikan beberapa hal sebagai berikut :

- (1) Populasi, produksi dan konsumsi mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun setelah terjadi krisis mengalami penurunan yang cukup tajam.
- (2) Perkembangan produksi yang lebih besar dibandingkan perkembangan populasi menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dalam usaha ternak ayam ras pedaging, yang mengindikasikan semakin dikuasainya teknologi budidaya.
- (3) Adanya perkembangan konsumsi produk ternak ayam ras pedaging menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat akan nilai gizi.
- (4) Dampak krisis moneter dan ekonomi telah menurunkan aktivitas usaha pada budidaya ayam ras pedaging, diperkirakan di lokasi penelitian jumlah peternak yang bertahan tinggal 30 persen dari kondisi sebelum krisis ekonomi.

Kinerja Industri Hulu dan Hilir

Dalam periode 1993-1996, perkembangan industri pembibitan di Jawa Barat adalah sebagai berikut: (1) jumlah perusahaan pembibitan (*breeding farm*) untuk *Grant Parent Stock* (GPS) dan *Parent Stock* (PS) relatif tetap, bahkan untuk perusahaan pembibitan PS mengalami penurunan sebesar 3,95 persen pertahun; (2) kapasitas produksi untuk PS ayam ras pedaging berkisar antara 8359 ribu - 17892 ribu ekor dan cenderung meningkat dengan pesat yaitu sebesar 34,13 persen pertahun; (3) kapasitas produksi Final Stock (FS) untuk pedaging berkisar antara 262615 ribu - 718654 ribu ekor dan meningkat dengan lebih cepat yaitu sebesar 47,55 persen pertahun; (4) produksi aktual doc FS untuk pedaging berkisar antara 194.796 ribu – 351,800 ribu ekor dan mengalami peningkatan dengan laju 26,59 persen pertahun. Namun setelah terjadi krisis moneter diperkirakan industri pembibitan di Jawa Barat hanya beroperasi 30-40 persen dari kapasitas produksinya

Situasi industri pembibitan sebelum dan sesudah krisis moneter di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut: (1) jumlah perusahaan GPS ada 3 buah, baik kondisi sebelum maupun sesudah krisis moneter; (2) jumlah perusahaan PS mengalami penurunan secara tajam dari 19 buah menjadi hanya tinggal 9 buah; (3) produksi doc PS mengalami penurunan secara tajam

dari 339.790 ekor per bulan menjadi 132.180 ekor atau menurun sebesar 61,10 persen; (4) produksi doc FS juga mengalami penurunan secara tajam dari 5.811,065 ekor menjadi 2.005.033 ekor atau turun sebesar 65,50 persen; (5) jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri pembibitan juga turun dari 2476 orang menjadi 2061 orang.

Hasil penelitian Sumaryanto dan Rusastra (1991) menyimpulkan bahwa efisiensi produksi pabrik pakan pada saat pengamatan adalah layak secara ekonomik dari segi pemanfaatan sumberdaya domestik hanya untuk memenuhi kebutuhan setempat (lokal). Untuk tujuan perdagangan antar daerah berada pada kondisi kritis dan tidak layak sama sekali untuk tujuan promosi ekspor. Industri pakan ayam ras di wilayah Bogor-Bekasi belum berproduksi secara efisien pada kondisi laba maksimum jangka pendek (Alim, 1996). Hal ini terutama disebabkan oleh belum optimalnya alokasi penggunaan jagung kuning, bungkil kedele dan “wheat pollar”.

Sistem pemasaran pabrik pakan berjalan tidak efisien, dimana pabrik pakan dan pelaku tata niaga (*agent/distributor* dan *poultry shop*) mengambil porsi keuntungan relatif besar (Saptana dan Rivai, 1996). Hal ini terjadi karena pabrik pakan membentuk kartel dan sistem pemasaran produk pakan ternak dijalankan dengan sistem komisi atau fee, di mana pelaku tata niaga pakan memperoleh fee sebesar 15-20 persen dari harga jual pakan. Disamping itu *poultry shop* masih memperoleh keuntungan dari penjualan pakan kepada peternak.

Perkembangan pabrik pakan di propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: (1) kapasitas produksi pakan ternak meningkat dari 912.442 ton (1991) menjadi 1,083.892 ton (1997) atau meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 4,42 persen pertahun; (2) produksi pakan ternak meningkat dari 427.771 ton (1991) menjadi 863.482 ton (1997) atau meningkat sebesar 15,33 persen pertahun; (3) produksi pakan untuk unggas juga meningkat dari 384.994 ton (1991) menjadi 777.134 ton (1997) atau meningkat sebesar 15,33 persen pertahun. Namun sejak terjadinya krisis, pabrik pakan hanya beroperasi 30 persen dari kapasitas aktualnya.

Krisis moneter dan ekonomi juga berdampak negatif terhadap pada industri hilirnya yaitu industri tempat pemotongan ayam (TPA) dan industri rumah potong ayam (RPA). Meskipun pada periode (1993-1997) jumlah TPA dan RPA meningkat, namun produksinya jauh dibawah kapasitasnya. RPA yang dimiliki PT Sierad Produce produksinya mengalami penurunan dari 30,000 - 40,000 ekor per hari sebelum krisis menjadi 15.000 - 20,000 ekor per hari atau turun sebesar 50 persen. Sementara itu RPA yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya hanya beroperasi 50 persen dari kapasitas produksi terpasang.

Pola Kerjasama Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging

Lahirnya konsep kerjasama usaha atau kemitraan usaha antara perusahaan pertanian (BUMN, swasta, koperasi) dengan pertanian rakyat (petani kecil) didasarkan atas dua argumen. Pertama, adanya perbedaan dalam penguasaan sumberdaya (lahan dan kapital) antara masyarakat industrial di perkotaan (pengusaha) dengan masyarakat pertanian di pedesaan (petani). Dimana orang kota dikategorikan mempunyai modal dan pengetahuan, namun kurang dalam sumberdaya lahan dan tenaga kerja, sedangkan di sisi lain orang desa mempunyai lahan dan tenaga kerja, namun kurang modal dan kemampuan (keterampilan).

Kedua, adanya perbedaan sifat hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha pada masing-masing subsistem dari sistem agribisnis. Di dalam subsistem usahatani, skala usaha kecil lebih efisien atau sama efisiennya dengan skala usaha besar, karena sifat hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha bersifat meningkat atau tetap (*increasing* atau *constant cost to scale*). Dalam subsistem pemasaran, pengolahan dan pengadaan saprodi, skala usaha besar lebih efisien dari pada skala kecil, karena sifat hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha bersifat menurun (*decreasing cost to scale*) (Sinaga, 1987).

Secara teknis peternak skala kecil lebih efisien dibandingkan peternak skala besar meskipun secara statistik selisih efisiensi teknisnya tidak signifikan (Ming, 1997). Surono (1997) mengemukakan bahwa tidak berkembangnya peternakan ayam ras skala kecil disebabkan oleh struktur pasar input dan output yang kurang kompetitif. Harga input yang diterima peternak skala kecil lebih mahal 20 – 30 persen dibandingkan harga yang diterima peternak skala besar. Dari kedua penulis tersebut juga diungkapkan batas skala usaha yang ideal berdasarkan ketersediaan tenaga kerja adalah sebesar 15.000 ekor per siklus.

Kedua argumen di atas merupakan faktor pendorong pentingnya kemitraan usaha yang diwujudkan melalui konsep Perusahaan Inti Rakyat (PIR) di mana pada subsektor peternakan dibentuklah PIR perunggasan (PIR-GAS). Dalam operasionalnya, PIR perunggasan dikenal dalam tiga bentuk, yaitu: (1) pola PIR dengan plasma kesepakatan, yaitu jaminan penyediaan sapronak dan pemasaran hasil; (2) pola PIR dengan plasma rasio, yaitu kerjasama inti plasma dengan sistem rasio harga, antara harga pakan, doc dan obat-obatan dengan harga jual hasil; dan (3) pola PIR dengan plasma mandiri (tanpa kesepakatan dan rasio harga).

Dengan dikeluarkannya Keppres 22/1990 yang pada dasarnya berisi pembebasan skala usaha, membuka kesempatan bagi pemodal besar untuk bergerak dalam bidang budidaya dengan syarat 65 persen dari produksinya ditujukan untuk ekspor (PMA) dan melakukan pembinaan terhadap peternakan rakyat melalui kemitraan usaha. Kemitraan tersebut

dilakukan melalui KINAK PRA, KINAK PIR dan KINAK SUPER. Pada tahun 1994 tercatat 10 perusahaan yang melakukan kemitraan usaha dengan peternak plasma dalam bentuk KINAK PRA dan KINAK PIR ayam ras, yang melibatkan 1208 orang peternak plasma. Setelah krisis moneter terjadi penurunan secara tajam perusahaan peternakan inti sebesar 25 persen, peternak plasma sebesar 40 persen dan jumlah ternak yang diusahakan turun sebesar 60 persen untuk KINAK PRA ayam ras pedaging.

Kemitraan usaha setelah terjadinya krisis mengalami kemerosotan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah tata niaga pakan yang berdasarkan sistem fee, sehingga mendorong poultry shop mencari peternak plasma (mitra) sebanyak-banyaknya tanpa melalui seleksi yang memadai dan hanya mengejar target penjualan pakan guna mengejar fee. Dengan adanya krisis moneter dan ekonomi, dimana pabrik pakan menuntut pembayaran tunai maka banyak poultry shop yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pola kemitraan yang semula dalam bentuk KINAK PRA atau PIR kesepakatan mengalami pergeseran kearah pola kerjasama sewa kandang (*contract farm*) sekaligus jasa tenaga kerja. Artinya peternak hanya sebagai pengelola ayam ras dengan memperoleh imbalan uang sewa kandang sebesar Rp. 50-75/ekor dan upah kerja Rp.200-225/ekor, sehingga peternak memperoleh penghasilan sebesar Rp.250-300/ekor per siklus. Sebagian peternak hanya menyewakan kandang saja dan perusahaan peternakan melakukan pengelolaan secara mandiri.

ANALISIS EFISIENSI DAN DAYA SAING

Tingkat efisiensi dan kemampuan daya saing ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti keuntungan finansial, keuntungan ekonomik, *profit cost ratio* (PCR) dan *domestic resource cost ratio* (DRCR). Hasil analisis efisiensi dan kemampuan daya saing agribisnis ayam ras pedaging berdasarkan pola pengusahaan, skala usaha dan lokasi penelitian dapat disimak pada Tabel 4.

Pada kondisi sebelum krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola pengusahaan, skala usaha dan lokasi baik secara finansial maupun ekonomik layak diteruskan dimana keuntungan finansial dan ekonomik per unit output lebih besar dari nol (Tabel 4). Pada kondisi sesudah krisis moneter hampir semua pola pengusahaan, skala usaha dan lokasi masih tetap menguntungkan baik secara finansial maupun ekonomik, kecuali pada pola Mandiri di Kabupaten Bogor. Secara finansial keuntungan agribisnis ayam ras petelur mengalami penurunan yang tajam sebagai akibat krisis moneter, sedangkan keuntungan ekonomik mengalami peningkatan. Hal ini terutama disebabkan oleh naiknya harga sarana

produksi terutama pakan sebagai akibat depresiasi rupiah terhadap dollar, sementara di sisi lain pendapatan masyarakat mengalami penurunan.

Tabel 4. Keuntungan Finansial dan Keuntungan Ekonomik, PCR dan DRCR Sistem Komoditi Ayam Ras Pedaging per Siklus (2 bulan) di Jawa Barat, Kondisi Sebelum Krisis Moneter (1996/1997) dan Sesudah Krisis Moneter (1997/1998)

Uraian	Sebelum krisis moneter ¹⁾				Sesudah krisis moneter ¹⁾			
	Keuntungan Finansial	Keuntungan Ekonomi	PCR	DRCR	Keuntungan Finansial	Keuntungan Ekonomik	PCR	DRCR
Kabupaten Bogor								
1. Pola KINAK PRA								
Skala 2 500 ekor	1 261	1 051	0,878	0,881	1 137	2 205	0,932	0,858
Skala 3 000 ekor	1 790	1 546	0,832	0,836	2 043	2 748	0,882	0,828
Skala 4 000 ekor	1 468	1 324	0,860	0,858	1 262	2 211	0,925	0,859
Skala 5 000 ekor	1 639	1 336	0,846	0,843	992	2 286	0,943	0,855
2. Pola KINAK PIR								
Skala 6 000 ekor	2 997	2 515	0,753	0,752	1 231	1 728	0,933	0,891
Skala 30 000 ekor	2 926	2 445	0,761	0,760	1 117	1 630	0,939	0,897
Skala 60 000 ekor	2 933	2 479	0,758	0,756	1 112	1 623	0,939	0,897
Skala 12 0000 ekor	3 020	2 483	0,753	0,752	1 052	1 570	0,940	0,899
Skala 150 000 ekor	2 913	2 492	0,754	0,750	1 040	1 580	0,942	0,899
3. Pola Mandiri								
Skala 8 000 ekor	3 185	2 327	0,764	0,781	256	1 394	0,986	0,917
Skala 15 000 ekor	3 341	2 583	0,757	0,777	531	2 220	0,972	0,876
skala 30 000 ekor	3 194	2 483	0,763	0,778	232	1 378	0,988	0,920
4. Pola Kont. kandang								
skala 30 000 ekor	2 352	2 111	0,792	0,797	133	1 336	0,992	0,921
skala 75 000 ekor	2 191	1 980	0,804	0,811	788	1 939	0,954	0,881
Kabupaten Tasikmalaya								
Pola KINAK PRA								
1, skala 1 000 ekor								
skala 2 000 ekor	1 264	2 184	0,853	0,772	251	1 928	0,986	0,876
skala 2 000 ekor	1 218	2 236	0,857	0,769	206	1 867	0,989	0,880
skala 2 500 ekor	1 413	2 339	0,837	0,759	595	2 147	0,967	0,863
skala 4 000 ekor	1 443	2 331	0,832	0,759	360	2 076	0,980	0,867
skala 5 000 ekor	1 494	2 366	0,828	0,756	547	2 103	0,970	0,865
skala 6 000 ekor	1 403	2 540	0,837	0,743	453	2 029	0,975	0,870
2. Pola kontrak kandang & jasa tenaga kerja								
skala 1 000 ekor	1 357	1 963	0,854	0,791	796	1 905	0,959	0,876
skala 2 000 ekor	1 484	2 027	0,840	0,788	1 439	2 310	0,927	0,852
skala 2 500 ekor	1 911	2 379	0,798	0,757	2 526	3 032	0,876	0,813
skala 3 000 ekor	1 883	2 705	0,799	0,727	3 048	3 452	0,851	0,790
skala 4 000 ekor	1 340	2 368	0,854	0,757	2 205	2 475	0,890	0,845
skala 5 000 ekor	1 901	2 392	0,799	0,755	1 225	2 180	0,937	0,862

Catatan:

1) Keuntungan finansial dan ekonomik adalah dalam rupiah/kg broiler karkas.

PCR = Private Cost Ratio

DRCR = Domestic Resource Cost Ratio

Pada kondisi sebelum krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola perusahaan, skala usaha dan lokasi diperoleh nilai PCR<1, Pada kondisi sesudah krisis moneter hampir semua pola perusahaan masih tetap memiliki keunggulan kompetitif, namun nilai PCR makin mendekati angka 1, Hal tersebut menunjukkan adanya keunggulan kompetitif, namun mengalami penurunan setelah terkena dampak krisis moneter. Penyebabnya adalah besarnya ketergantungan bahan baku pakan dari impor.

Pada kondisi sebelum dan sesudah krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola pengusahaan, skala usaha dan lokasi diperoleh nilai $DRC < 1$, Nilai DRC kurang dari satu mengindikasikan adanya keunggulan komparatif, meskipun keunggulan yang dimiliki menurun setelah terjadinya krisis moneter dan ekonomi. Berdasarkan nilai PCR dan DRC yang relatif konstan pada berbagai skala usaha menunjukkan bahwa efisiensi dan daya saing agribisnis ayam ras pedaging antar skala usaha relatif sama.

DAMPAK DIVERGENSI DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

Ukuran dampak divergensi dan kebijaksanaan pemerintah dalam Matrik PAM adalah transfer output (Output Transfer, OT), transfer input (Input Transfer, IT), transfer faktor (Factor Transfer, FT) dan transfer bersih (Net Transfer, NT). Ukuran relatif ditunjukkan oleh analisis koefisien proteksi output nominal atau *nominal protection coefficient on output* (NPCO), koefisien proteksi input nominal atau *nominal protection coefficient on input* (NPCI), koefisien proteksi efektif atau *effectif protection coefficient* (EPC). Koefisien profitabilitas atau *profitability coefficient* (PC) dan rasio subsidi bagi produsen atau *subsidy ratio to producer* (SRP).

Dampak Divergensi dan Kebijakan di Bidang Output

Campur tangan pemerintah atau adanya divergensi dalam output dapat dilihat dari besarnya nilai transfer output (OT) dan NPCO. Bentuk campur tangan pemerintah tersebut adalah kebijaksanaan perdagangan yang berupa hambatan impor (tarif atau kuota) serta kebijaksanaan subsidi dan pajak. Sebagai ilustrasi sampai dengan tahun 1998 pemerintah Indonesia masih mengenakan tarif impor ayam hidup sebesar 10 persen dan daging ayam sebesar 5 persen (Departemen Keuangan, 1999). Transfer output (OT) merupakan selisih antara penerimaan yang dihitung atas harga finansial dengan penerimaan yang dihitung berdasar harga bayangan. Koefisien proteksi output nominal (NPCO) merupakan indikasi dari transfer output yang ditunjukkan oleh rasio antara penerimaan yang dihitung berdasar harga finansial dengan penerimaan yang dihitung berdasar harga bayangan.

Berdasarkan hasil analisis dari tabel Matrik PAM diperoleh hasil OT dan NPCO untuk agribisnis ayam ras pedaging, yang dapat disimak pada Tabel 5. Pada kondisi sebelum krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola pengusahaan, skala usaha di Kabupaten Bogor diperoleh nilai OT positif. Nilai OT positif mengandung arti masyarakat membeli dan produsen menerima dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya. Sebaliknya di Kabupaten Tasikmalaya dua pola yang diteliti yaitu KINAK PRA serta Kontrak

Kandang dan jasa tenaga kerja diperoleh nilai OT negatif. Hal tersebut disebabkan pengusaha agribisnis ayam ras pedaging di Kabupaten Bogor mempunyai akses yang lebih baik dalam perolehan sapronak maupun dalam penjualan hasil. Pada kondisi sesudah terjadi krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola perusahaan, skala usaha dan lokasi diperoleh OT yang positif.

Tabel 5. Nilai OT dan NPCO Sistem Agribisnis Ayam Ras Pedaging per Siklus (2 Bulan) di Jawa Barat, Kondisi Sebelum Krisis Moneter (1996/1997) dan Sesudah Krisis Moneter (1997/1998)

Uraian	Sebelum krisis moneter		Sesudah krisis moneter	
	OT (Rp/kg Broiler Karkas)	NPCO	OT (Rp/kg Broiler Karkas)	NPCO
Kabupaten Bogor				
1. Pola KINAK PRA				
Skala 2 500 ekor	1 232	1,071	976	1,033
Skala 3 000 ekor	1 232	1,071	976	1,033
Skala 4 000 ekor	1 232	1,071	976	1,033
Skala 5 000 ekor	1 232	1,071	976	1,033
2. Pola KINAK PIR				
Skala 6 000 ekor	2 400	1,139	2 536	1,086
Skala 30 000 ekor	2 400	1,139	2 536	1,086
Skala 60 000 ekor	2 400	1,139	2 536	1,086
Skala 120 000 ekor	2 400	1,138	2 536	1,086
Skala 150 000 ekor	2 400	1,138	2 536	1,086
3. Pola Mandiri				
Skala 8 000 ekor	2 657	1,132	1 747	1,053
Skala 15 000 ekor	2 725	1,132	1 241	1,036
Skala 30 000 ekor	2 648	1,129	1 791	1,053
4. Pola Kontrak kandang dan jasa tenaga kerja				
Skala 30 000 ekor	1 037	1,017	1 096	1,021
Skala 75 000 ekor	848	1,049	1 096	1,007
Kabupaten Tasikmalaya				
1. Pola KINAK PRA				
skala 1 000 ekor	-2 120	0,853	4 552	1,158
skala 2 000 ekor	-2 120	0,875	4 637	1,155
skala 2 500 ekor	-2 121	0,861	4 550	1,152
skala 4 000 ekor	-2 120	0,867	4 552	1,147
skala 5 000 ekor	-2 120	0,857	4 634	1,155
skala 6 000 ekor	-2 120	0,888	4 571	1,155
2. Pola Kontrak kandang dan jasa tenaga kerja				
skala 1 000 ekor	-1 448	0,917	5 910	1,167
skala 2 000 ekor	-1 448	0,917	6 601	1,187
skala 2 500 ekor	-1 448	0,917	6 601	1,190
skala 3 000 ekor	-1 448	0,917	6 601	1,198
skala 4 000 ekor	-1 448	0,917	6 601	1,185
skala 5 000 ekor	-1 448	0,917	6 573	1,207

Catatan:

OT = Output Transfer (Transfer Output)

NPCO = Nominal Protection Coefficient on Output (koefisien proteksi nominal pada output)

Pada kondisi sebelum krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola perusahaan, skala usaha di Kabupaten Bogor diperoleh nilai NPCO >1 , Nilai NPCO yang lebih besar dari satu menunjukkan adanya distorsi pasar atau kebijaksanaan pemerintah yang menyebabkan harga finansial lebih besar dari harga bayangannya. Sebaliknya di Kabupaten Tasikmalaya dua pola yang diteliti yaitu KINAK PRA serta Kontrak Kandang dan Jasa Tenaga Kerja diperoleh nilai NPCO <1 , namun sudah mendekati angka satu. Pada kondisi sesudah terjadi krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola perusahaan, skala usaha dan lokasi diperoleh nilai NPCO >1 .

Dampak Divergensi dan Kebijakan di Bidang Input

Dampak divergensi dan kebijakan pemerintah pada input *tradable* ditunjukkan oleh nilai transfer input (Input Transfer, IT) dan NPCI. Bentuk kebijakan pada input *tradable* dapat berupa kebijakan perdagangan serta subsidi dan pajak, sedangkan bentuk divergensi lainnya dapat disebabkan adanya distorsi pasar. Transfer input (IT) menunjukkan selisih antara biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga finansial dengan biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga bayangan. Koefisien proteksi input nominal (NPCI) sebagai indikasi transfer input yang merupakan rasio antara biaya input yang dihitung berdasar harga finansial dengan biaya input *tradable* yang dihitung pada harga bayangan.

Sementara itu divergensi atau kebijakan yang terdapat pada input domestik ditunjukkan oleh nilai transfer faktor (Factor Transfer, FT). Kebijakan yang dilakukan dapat berbentuk subsidi atau pajak, sedangkan divergensi juga dapat disebabkan distorsi pasar seperti adanya struktur pasar oligopoli, oligopsoni, monopoli dan monopsoni. Secara lebih terperinci informasi mengenai nilai IT, NPCI dan FT agribisnis ayam ras pedaging dapat disimak pada Tabel 6.

Pada kondisi sebelum krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola perusahaan, skala usaha di Kabupaten Bogor sebagian besar diperoleh nilai IT yang positif. Nilai IT yang positif mempunyai arti terdapat kebijakan pemerintah atau distorsi pasar pada input *tradable* yang merugikan pelaku agribisnis ayam ras pedaging, karena membuat harga input *tradable* yang dibeli produsen menjadi lebih mahal dibanding tidak ada kebijakan atau distorsi pasar. Sebaliknya untuk pola KINAK PRA dan Mandiri di Kabupaten Tasikmalaya diperoleh nilai IT yang negatif. Artinya terdapat kebijakan pemerintah atau distorsi pasar pada input *tradable* yang menguntungkan pelaku agribisnis ayam ras pedaging di Kabupaten Tasikmalaya. Pada kondisi sesudah terjadi krisis moneter diperoleh nilai IT yang negatif pada pola KINAK PRA, pola Mandiri di Kabupaten Bogor,

sedangkan nilai IT pada KINAK PIR di Bogor, pola KINAK PRA serta pola Kontrak Kandang dan jasa tenaga kerja di Tasikmalaya diperoleh nilai IT yang positif.

Tabel 6. Nilai IT, NPCI dan FT Sistem Komoditi Ayam Rras Pedaging per Siklus (2 bulan) di Jawa Barat, Kondisi Ssebelum Krisis Moneter (1996/1997) dan Sesudah Krisis Moneter (1997/1998)

Uraian	Sebelum krisis moneter			Sesudah krisis moneter		
	FT (Rp/kg broiler karkas)	IT (Rp/kg broiler karkas)	NPCI	FT (Rp/kg broiler karkas)	IT (Rp/kg broiler karkas)	NPCI
Kabupaten Bogor						
1. Pola KINAK PRA						
skala 2 500 ekor	1 035	27	1,003	2 249	-206	0,985
skala 3 000 ekor	958	30	1,004	2 165	-487	0,964
skala 4 000 ekor	1 015	73	1,009	2 025	-100	0,993
skala 5 000 ekor	947	-17	0,998	2 871	-601	0,956
2. Pola KINAK PIR						
skala 6 000 ekor	1 519	399	1,056	2 960	72	1,005
skala 30 000 ekor	1 562	357	1,050	2 952	97	1,007
skala 60 000 ekor	1 531	402	1,056	2 940	106	1,008
skala 120 000 ekor	1 647	216	1,030	2 468	587	1,042
skala 150 000 ekor	1 474	505	1,069	2 923	153	1,011
3. Pola Mandiri						
skala 8 000 ekor	1 616	288	1,032	2 987	-101	0,994
skala 15 000 ekor	1 614	224	1,024	3 309	-108	0,993
skala 30 000 ekor	1 569	368	1,040	3 024	-87	0,995
4. Pola Kontrak Kandang dan jasa tenaga kerja						
skala 30 000 ekor	687	109	1,017	2 032	267	1,021
skala 75 000 ekor	517	120	1,018	2 161	86	1,007
Kabupaten Tasikmalaya						
1. Pola KINAK PRA						
skala 1 000 ekor	-46	-1 153	0,853	4 033	2 196	1,158
skala 2 000 ekor	-194	-966	0,875	4 131	2 166	1,155
skala 2 500 ekor	-123	-1 072	0,861	3 998	2 104	1,152
skala 4 000 ekor	-203	-1 029	0,867	4 233	2 031	1,147
skala 5 000 ekor	-149	-1 099	0,857	4 039	2 151	1,155
skala 6 000 ekor	-139	-844	0,888	3 990	2 157	1,155
2. Pola Kontrak Kandang dan jasa tenaga kerja						
skala 1 000 ekor	491	-1 333	0,833	5 366	2 342	1,167
skala 2 000 ekor	234	-1 138	0,854	4 924	2 548	1,187
skala 2 500 ekor	126	-1 106	0,854	4 586	2 521	1,190
skala 3 000 ekor	282	-908	0,878	4 432	2 573	1,198
skala 4 000 ekor	483	-903	0,882	4 371	2 500	1,185
skala 5 000 ekor	223	-1 181	0,845	4 711	2 817	1,207

Catatan:

FT = Factor Transfer (Transfer Faktor)

IT = Input Transfer (Transfer Input)

NPCI = Nominal Protection Coefficient on Input (koefisien proteksi nominal pada input)

Pada kondisi sebelum krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola perusahaan dan skala usaha di Kabupaten Bogor sebagian besar diperoleh nilai NPCI > 1, namun masih mendekati angka satu. Hal tersebut mengandung arti terdapat proteksi yang relatif kecil pada produsen input *tradable*, sedangkan sektor yang menggunakan yaitu pelaku agribisnis ayam ras pedaging (peternak) sedikit dirugikan. Sebaliknya untuk pola KINAK PRA serta pola Kontrak Kandang dan jasa tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya diperoleh

nilai NPCI <1 , Artinya pada daerah ini tidak terdapat proteksi pada produsen input tradable pada kondisi sebelum krisis moneter. Pada kondisi setelah terjadi krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pola KINAK PRA dan pola Mandiri di Kabupaten Bogor diperoleh nilai NPCI <1 , meskipun mendekati angka satu. Sementara itu untuk pola KINAK PIR di Kabupaten Bogor, pola KINAK PRA serta pola Kontrak Kandang dan jasa tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya diperoleh nilai NPCI >1 ,

Pada kondisi sebelum krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola perusahaan, skala usaha di Kabupaten Bogor diperoleh nilai FT yang positif. Artinya, terdapat kebijaksanaan pemerintah atau distorsi pasar yang menguntungkan produsen input faktor domestik, yang dapat berupa subsidi pupuk, subsidi suku bunga atau struktur pasar input domestik yang bersifat oligopolistik. Sebaliknya untuk dua pola usaha di Kabupaten Tasikmalaya diperoleh nilai FT yang negatif. Pada kondisi setelah terjadi krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola usaha, skala usaha dan lokasi diperoleh nilai FT yang positif, nilai tersebut umumnya lebih besar dibandingkan sebelum krisis moneter. Artinya terdapat kebijaksanaan pemerintah atau distorsi pasar yang semakin menguntungkan produsen input faktor domestik, berupa subsidi pupuk, subsidi suku bunga dan lain-lain.

Dampak Divergensi dan Kebijakan Input-Output

Dampak divergensi dan kebijakan input dan output secara keseluruhan dapat dilihat dari nilai transfer bersih (Net Transfer, NT), koefisien proteksi efektif (Effective Protection Coefficient, EPC), rasio proteksi efektif (Effective Protection Ratio, EPR) dan rasio subsidi ke produsen (Subsidy Ratio to Producers, SRP). Pada kondisi sebelum krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola perusahaan, skala usaha di Kabupaten Bogor diperoleh nilai NT yang positif (Tabel 7). Sementara itu agribisnis ayam ras pedaging pada pola KINAK PRA serta pola Kontrak Kandang dan jasa tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya diperoleh nilai NT yang negatif. Nilai NT yang positif menunjukkan adanya insentif ekonomi bagi pelaku agribisnis ayam ras pedaging di Kabupaten Bogor, sebaliknya pelaku agribisnis ayam ras pedaging di Kabupaten Tasikmalaya tidak memperoleh insentif untuk meningkatkan produksi atau usahanya. Pada kondisi setelah terjadi krisis moneter usaha agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola perusahaan, skala usaha dan lokasi adalah negatif.. Kondisi tersebut menunjukkan pada kondisi sesudah terjadi krisis moneter tidak lagi ada insentif ekonomi untuk meningkatkan produksi daging ayam. Hal ini juga diindikasikan banyaknya peternak yang gulung tikar.

Pada kondisi sebelum krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola pengusahaan, skala usaha di Kabupaten Bogor diperoleh nilai $PC > 1$, Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya diperoleh nilai $PC < 1$, Nilai $PC > 1$ mengandung arti bahwa keuntungan yang diterima pelaku agribisnis ayam ras pedaging lebih besar dari keuntungan yang seharusnya diterima dibanding bila tidak ada campur tangan pemerintah atau distorsi pasar dan sebaliknya jika $PC < 1$, Pada kondisi setelah terjadi krisis moneter diperoleh nilai $PC < 1$, Artinya, usaha agribisnis ayam ras pedaging memperoleh keuntungan yang lebih kecil dari yang seharusnya dibanding bila tidak ada campur tangan pemerintah atau distorsi pasar.

Tabel 7. Nilai NT, PC, EPC dan SRP Sistem Komoditi Ayam Ras Pedaging per Siklus (2 bulan) di Jawa Barat, Kondisi Ssebelum Krisis Moneter (1996/1997) dan Sesudah Krisis Moneter (1997/1998)

Uraian	Sebelum krisis moneter				Sesudah krisis moneter			
	NT (Rp/kg telur)	PC	EPC	SRP	NT (Rp/kg telur)	PC	EPC	SRP
Kabupaten Bogor								
1. Pola KINAK PRA								
skala 2 500 ekor	170	1,155	1,132	0,010	-1 068	0,516	1,076	-0,036
skala 3 000 ekor	244	1,158	1,127	0,014	-702	0,744	1,092	-0,024
skala 4 000 ekor	145	1,109	1,124	0,008	-949	0,571	1,069	-0,032
skala 5 000 ekor	302	1,226	1,133	0,017	-1 294	0,434	1,100	-0,044
2. Pola KINAK PIR								
Skala 6 000 ekor	481	1,191	1,197	0,028	-497	0,713	1,155	-0,017
Skala 30 000 ekor	481	1,197	1,201	0,028	-513	0,685	1,155	-0,017
Skala 60 000 ekor	467	1,189	1,198	0,027	-511	0,685	1,155	-0,017
Skala 120 000 ekor	537	1,216	1,218	0,031	-519	0,670	1,125	-0,018
Skala 150 000 ekor	421	1,169	1,190	0,024	-540	0,658	1,154	-0,018
3. Pola Mandiri								
skala 8 000 ekor	754	1,310	1,213	1,213	-1 138	0,183	1,110	-0,035
skala 15 000 ekor	758	1,294	1,220	1,220	-1 689	0,239	1,075	-0,049
skala 30 000 ekor	711	1,286	1,286	1,204	-1 146	0,169	1,110	-0,034
4. Pola Kontrak Kandang dan jasa tenaga kerja								
skala 30 000 ekor	241	1,114	1,089	0,014	-1 203	0,100	1,049	-0,041
skala 75 000 ekor	212	1,107	1,070	0,012	-1 151	0,406	1,062	-0,039
Kabupaten Tasikmalaya								
1. Pola KINAK PRA								
skala 1 000 ekor	-921	0,579	0,899	-0,053	-1 677	0,130	1,151	-0,057
skala 2 000 ekor	-1 019	0,544	0,881	-0,059	-1 661	0,110	1,159	-0,056
skala 2 500 ekor	-926	0,604	0,892	-0,053	-1 552	0,277	1,156	-0,053
skala 4 000 ekor	-888	0,619	0,887	-0,051	-1 716	0,173	1,162	-0,058
skala 5 000 ekor	-871	0,632	0,895	-0,050	-1 556	0,260	1,159	-0,053
skala 6 000 ekor	-1 137	0,553	0,087	-0,065	-1 576	0,223	1,155	-0,053
2. Pola Kontrak Kandang dan jasa tenaga kerja								
skala 1 000 ekor	-606	0,691	0,988	-0,035	-1 108	0,418	1,277	-0,038
skala 2 000 ekor	-544	0,732	0,968	-0,031	-872	0,623	1,257	-0,030
skala 2 500 ekor	-468	0,803	0,965	-0,027	-506	0,833	1,251	-0,017
skala 3 000 ekor	-823	0,696	0,946	-0,047	-405	0,833	1,246	-0,014
skala 4 000 ekor	-1 029	0,566	0,944	-0,059	-270	0,891	1,258	-0,009
skala 5 000 ekor	-491	0,795	0,973	-0,028	-956	0,562	1,238	-0,033

Catatan :

NT = Net Transfer (Transfer Bersih)

PC = Profitability Coefficient (Koefisien Profitabilitas)

EPC = Effective Protection Coefficient (Koefisien Proteksi Efektif)

SRP = Subsidy Ratio to Producers (Rasio Subsidi pada Producers)

Pada kondisi sebelum krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola pengusahaan, skala usaha di Kabupaten Bogor diperoleh $EPC > 1$, sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya nilai $EPC < 1$, Nilai $EPC > 1$ mengandung arti bahwa terdapat kebijaksanaan pemerintah atau distorsi pasar yang menyebabkan harga finansial output lebih besar dari harga bayangannya dan atau harga finansial input lebih kecil dari harga bayangannya. Pada kondisi sesudah terjadi krisis moneter pada semua pola, skala usaha dan lokasi yang diteliti diperoleh nilai $EPC < 1$, Artinya terdapat kebijaksanaan yang menyebabkan harga finansial output lebih kecil dari harga bayangannya dan atau harga finansial input lebih besar dari harga bayangannya.

Pada kondisi sebelum krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola pengusahaan, skala usaha di Kabupaten Bogor diperoleh nilai SRP positif, sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya diperoleh SRP yang negatif. Nilai SRP positif mengandung arti bahwa kebijaksanaan pemerintah atau distorsi pasar yang ada selama ini menyebabkan pelaku agribisnis ayam ras pedaging mengeluarkan biaya produksi lebih kecil dari biaya imbalan berproduksi dan sebaliknya jika SRP negatif. Pada kondisi sesudah terjadi krisis moneter agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola pengusahaan, skala usaha dan lokasi diperoleh nilai SRP negatif. Artinya, pelaku agribisnis ayam ras pedaging mengeluarkan biaya produksinya lebih besar dari biaya imbalan berproduksi dibanding bila tidak ada campur tangan pemerintah atau distorsi pasar.

DAMPAK ALTERNATIF KEBIJAKSANAAN HARGA INPUT DAN OUTPUT TERHADAP EFISIENSI DAN DAYA SAING SISTEM KOMODITI AYAM RAS

Analisis sensitivitas (analisis kepekaan) perlu dilakukan karena analisis dalam metode PAM merupakan analisis yang bersifat statis, meskipun dalam penelitian ini sudah dilakukan pada dua titik waktu yaitu sebelum krisis moneter (1996/1997) dan sesudah krisis moneter (1997/1998). Analisis sensitivitas berguna untuk mengetahui kepekaan efisiensi finansial dan ekonomi dalam pengusahaan sistem komoditi ayam ras pedaging pada kondisi setelah terjadi krisis moneter terhadap perubahan-perubahan pada komponen yang sangat berpengaruh.

Komponen terbesar dari biaya produksi untuk sistem komoditi ayam ras pedaging adalah biaya untuk ransum. Biaya ransum ayam ras pedaging berkisar antara 50-65 persen, dan proporsi biaya pakan ini meningkat dengan terjadinya krisis moneter. Oleh karena itu akan dilakukan analisa kepekaan terhadap harga ransum dengan mempertimbangkan kenaikan harga ransum sementara faktor lain tetap. Efisiensi finansial dan ekonomi sistem komoditi ayam ras

pedaging sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga daging ayam (broiler) baik harga finansial maupun harga sosial. Oleh karena itu akan diadakan analisa kepekaan terhadap perubahan harga broiler.

Ketiga akan dilakukan analisa sensitivitas terhadap perubahan harga ransum dan broiler yang terjadi secara bersama-sama, yaitu keduanya mengalami kenaikan. Dalam dunia nyata kondisi ketiga inilah yang sering terjadi, terjadi kenaikan harga broiler namun lebih rendah dari kenaikan harga pakan. Besarnya prosentase perubahan pada harga pakan, harga output dan gabungan keduanya didasarkan atas perkembangan harga selama periode 1994-1998.

Mengingat cakupan dalam penelitian ini begitu luas, maka analisis sensitivitas hanya akan dilakukan pada kondisi setelah terjadi krisis moneter dan skala usaha selektif. Hal ini dilandasi bahwa analisis sensitivitas relevan dilakukan pada kondisi terakhir setelah terjadi krisis moneter dan hasil analisis efisiensi finansial dan ekonomi relatif sama antar skala usaha.

Informasi secara terperinci hasil analisis sensitivitas perusahaan agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola perusahaan kondisi setelah terjadi krisis moneter skala usaha selektif, dapat disimak pada Tabel 8. Pada kondisi awal, sebelum dilakukan analisis sensitivitas diperoleh beberapa informasi sebagai berikut : (1) Untuk pola KINAK PRA di Kabupaten Bogor, skala usaha 5 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,943 dan DRCCR = 0,855; (2) Untuk pola KINAK PIR di Kabupaten Bogor, skala usaha 6 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,933 dan nilai DRCCR = 0,891; (3) Untuk pola Mandiri di Kabupaten Bogor, skala usaha 8 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,986 dan nilai DRCCR = 0,917; (4) Untuk pola kontrak kandang dan jasa tenaga kerja di Kabupaten Bogor, skala usaha 15 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,947 dan nilai DRCCR = 0,891; (5) Untuk pola KINAK PRA di Kabupaten Tasikmalaya, skala usaha 6 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,986 dan nilai DRCCR = 0,876; dan (6) Untuk pola kontrak kandang dan jasa tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya, skala usaha 5 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,959 dan DRCCR = 0,876.

Pada kondisi setelah terjadi krisis moneter sistem komoditi ayam ras pedaging pada berbagai pola usaha baik di Kabupaten Bogor maupun Tasikmalaya efisien secara finansial atau memiliki keunggulan kompetitif dan efisien secara ekonomi atau memiliki keunggulan komparatif. Namun dari besarnya nilai indikator yang diperoleh menunjukkan efisiensi finansial atau keunggulan kompetitif dan efisiensi ekonomi atau keunggulan komparatif yang dimiliki relatif rendah, yang ditunjukkan oleh nilai PCR dan DRCCR yang meskipun < 1 tetapi besarnya sudah mendekati angka satu.

Tabel 8. Nilai PCR dan DRCR pada Tahun 1997/1998 (setelah Krisis Moneter) dan Alternatif Kebijakan Pengusahaan Sistem Komoditi Ayam Ras (2 bulan) di Jawa Barat

Simulasi kebijakan	Kabupaten Bogor								Kabupaten Tasikmalaya			
	Pola KINAK PRA: 5 000 ekor		Pola KINAK PIR: 6 000 ekor		Pola Mandiri: 8 000 ekor		Pola kontrak kandang & jasa tenaga kerja: 15 000 ekor		Pola KINAK PRA: 6 000 ekor		Pola kontrak kandang dan jasa tenaga kerja: 5 000 ekor	
	PCR	DRCR	PCR	DRCR	PCR	DRCR	PCR	DRCR	PCR	DRCR	PCR	DRCR
Kondisi tahun 1997/1998 (setelah krisis moneter)	0,943	0,855	0,933	0,891	0,986	0,917	0,947	0,891	0,986	0,876	0,959	0,876
Alternatif kebijakan												
1. Harga daging ayam naik 20%	0,847	0,773	0,847	0,808	0,885	0,824	0,861	0,814	0,875	0,788	0,847	0,783
2. Harga pakan naik 40%	1,161	1,007	1,120	1,047	1,212	1,094	1,116	1,008	1,037	1,028	1,115	1,019
3. Harga telur naik 20% dan harga pakan naik 40%	1,009	0,894	0,989	0,925	1,052	0,956	0,989	0,903	0,927	0,907	0,980	0,901

Catatan :
Singkatan pada Tabel ini sama seperti Tabel sebelumnya

Analisis sensitivitas yang dilakukan terhadap kenaikan harga daging ayam 20 persen, sementara faktor lainnya tetap diperoleh hasil analisis sebagai berikut: (1) Untuk pola KINAK PRA di Kabupaten Bogor, skala usaha 5 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,847 dan DRCR = 0,773; (2) Untuk pola KINAK PIR di Kabupaten Bogor, skala usaha 6 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,847 dan nilai DRCR = 0,808; (3) Untuk pola Mandiri di Kabupaten Bogor, skala usaha 8 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,885 dan nilai DRCR = 0,824; (4) Untuk pola kontrak kandang dan jasa tenaga kerja di Kabupaten Bogor, skala usaha 15 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,861 dan nilai DRCR = 0,814; (5) Untuk pola KINAK PRA di Kabupaten Tasikmalaya, skala usaha 6 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,875 dan nilai DRCR = 0,788; dan (6) Untuk pola kontrak kandang dan jasa tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya, skala usaha 5 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,847 dan DRCR = 0,783.

Hasil analisis sensitivitas tersebut menunjukkan bahwa adanya kenaikan harga daging ayam sebesar 20 persen, sementara faktor lain tetap akan meningkatkan efisiensi finansial dan

efisiensi ekonomi usaha sistem komoditi ayam ras pedaging. Fakta empiris menunjukkan bahwa kenaikan harga di tingkat konsumen tidak ditransmisikan secara sempurna ke tingkat peternak, sehingga peternak hanya memperoleh kenaikan harga yang relatif kecil.

Analisis sensitivitas yang dilakukan terhadap harga pakan naik sebesar 40 persen, sementara faktor lain dianggap tetap diperoleh hasil analisis sebagai berikut : (1) Untuk pola KINAK PRA di Kabupaten Bogor, skala usaha 5 000 ekor diperoleh nilai PCR = 1,161 dan DRCCR = 1,007; (2) Untuk pola KINAK PIR di Kabupaten Bogor, skala usaha 6 000 ekor diperoleh nilai PCR = 1,120 dan nilai DRCCR = 1,047; (3) Untuk pola Mandiri di Kabupaten Bogor, skala usaha 8 000 ekor diperoleh nilai PCR = 1,212 dan nilai DRCCR = 1,094; (4) Untuk pola kontrak kandang dan jasa tenaga kerja di Kabupaten Bogor, skala usaha 15 000 ekor diperoleh nilai PCR = 1,116 dan nilai DRCCR = 1,008; (5) Untuk pola KINAK PRA di Kabupaten Tasikmalaya, skala usaha 6 000 ekor diperoleh nilai PCR = 1,037 dan nilai DRCCR = 1,028; dan (6) Untuk pola kontrak kandang dan jasa tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya, skala usaha 5 000 ekor diperoleh nilai PCR = 1,115 dan DRCCR = 1,019.

Hasil analisis sensitivitas tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga pakan sebesar 40 persen, sementara faktor lainnya tetap akan menurunkan efisiensi finansial dan ekonomi usaha sistem komoditi ayam ras pedaging. Pada kondisi ini secara finansial usaha agribisnis ayam ras pedaging sudah tidak efisien lagi yang ditunjukkan oleh nilai PCR > 1, Secara ekonomik dengan kenaikan harga pakan 40 persen usaha ayam ras pedaging memberikan gambaran yang relatif sama yaitu sudah tidak efisien lagi, yang ditunjukkan oleh nilai DRCCR > 1,

Analisis sensitivitas gabungan terhadap kenaikan harga daging ayam 20 persen dan harga pakan 40 persen, sementara faktor lain dianggap tetap diperoleh hasil sebagai berikut : (1) Untuk pola KINAK PRA di Kabupaten Bogor, skala usaha 5 000 ekor diperoleh nilai PCR = 1,009 dan DRCCR = 0,894; (2) Untuk pola KINAK PIR di Kabupaten Bogor, skala usaha 6 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,989 dan nilai DRCCR = 0,925; (3) Untuk pola Mandiri di Kabupaten Bogor, skala usaha 8 000 ekor diperoleh nilai PCR = 1,052 dan nilai DRCCR = 0,956; (4) Untuk pola kontrak kandang dan jasa tenaga kerja di Kabupaten Bogor, skala usaha 15 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,989 dan nilai DRCCR = 0,903; (5) Untuk pola KINAK PRA di Kabupaten Tasikmalaya, skala usaha 6 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,927 dan nilai DRCCR = 0,907; dan (6) Untuk pola kontrak kandang dan jasa tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya, skala usaha 5 000 ekor diperoleh nilai PCR = 0,980 dan DRCCR = 0,901,

Hasil analisis sensitivitas tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga pakan 40 persen dan diikuti kenaikan harga daging ayam sebesar 20 persen menunjukkan bahwa perusahaan sistem komoditi ayam ras pedaging sudah tidak efisien secara finansial yang ditunjukkan oleh nilai PCR mendekati angka 1 dan bahkan >1 , sedangkan secara ekonomik masih efisien yang ditunjukkan oleh nilai DRCR <1 , namun sudah mendekati angka satu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perusahaan agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola, skala usaha dan lokasi yang diteliti pada kondisi sebelum krisis moneter adalah menguntungkan baik secara finansial maupun ekonomik. Pada kondisi setelah krisis moneter perusahaan agribisnis ayam ras pedaging mengalami penurunan tingkat keuntungan baik secara finansial maupun ekonomik. Namun apabila ditelusuri pada tiap pelaku agribisnis ayam ras pedaging, pada kondisi sebelum krisis moneter usaha ternak memperoleh margin keuntungan yang relatif kecil sedangkan pelaku tataniaga (RPA dan pedagang daging ayam) memperoleh margin keuntungan yang lebih besar, bahkan pada kondisi setelah krisis moneter dimana hampir semua usaha ternak mengalami kerugian besar, para pelaku tataniaga daging ayam mengalami peningkatan keuntungan.
2. Kondisi tersebut diatas menempatkan peternak ayam ras pedaging pada posisi yang sulit. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya harga sapronak hampir tiga kali lipat setelah terjadi krisis moneter, tingginya tingkat suku bunga bank (diatas 36%), kemitraan tidak dijalankan secara konsisten sehingga memperlemah posisi peternak menghadapi struktur pasar yang oligopolistik baik pada pasar input maupun output; dan rendahnya daya beli masyarakat terhadap produk ayam ras.
3. Rasio biaya privat (PCR) perusahaan agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola, skala usaha dan lokasi yang diteliti pada kondisi sebelum krisis moneter lebih kecil dari satu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan agribisnis ayam ras pedaging efisien secara finansial atau memiliki keunggulan kompetitif dan dapat memacu pertumbuhan produksi. Namun pada kondisi setelah terjadi krisis moneter diperoleh nilai PCR yang semakin besar mendekati angka satu dan pada pola mandiri diperoleh nilai diatas satu. Hal tersebut mengandung arti bahwa perusahaan agribisnis ayam ras pedaging mengarah pada keadaan yang tidak efisien atau semakin tidak memiliki keunggulan kompetitif.

4. Rasio biaya sumberdaya domestik (DRCR) perusahaan agribisnis ayam ras pedaging pada berbagai pola, skala usaha dan lokasi penelitian baik pada kondisi sebelum maupun setelah krisis moneter lebih kecil dari satu. Namun nilai DRCR yang diperoleh makin mendekati angka satu, sejak terjadi krisis moneter. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan agribisnis ayam ras pedaging efisien secara ekonomik atau memiliki keunggulan komparatif, namun keunggulannya menurun sejak terjadi krisis moneter.
5. Kebijakan pemerintah terhadap input dan output secara keseluruhan pada kondisi sebelum dan sesudah krisis moneter menunjukkan adanya perlindungan (proteksi) terhadap agribisnis ayam ras pedaging. Kebijakan protektif tersebut dapat berupa subsidi input, subsidi suku bunga, hambatan impor output, dan berbagai program penyehatan agribisnis ayam ras pedaging. Kebijakan protektif tersebut menyebabkan penerimaan finansial lebih besar dari penerimaan ekonomi dan atau pengeluaran input tradable finansial lebih kecil dibandingkan dengan biaya input tradable ekonomi.

Saran

1. Program peningkatan produksi ayam pedaging dapat dikembangkan di kedua daerah penelitian. Hal yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan naiknya harga sapronak terutama ransum (pakan), bibit (DOC) serta obat, vitamin dan mineral yang meningkat hampir tiga kali lipat setelah krisis, sementara harga output belum meningkat secara proporsional karena rendahnya daya beli masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan melalui kelompok atau koperasi perlu dimantapkan dan diberdayakan sehingga mampu menekan biaya produksi dan menjamin harga output yang layak.
2. Keuntungan peternak secara finansial pada kondisi setelah krisis moneter mengalami penurunan keuntungan secara tajam. Sementara pada subsistem lainnya bahkan keuntungannya meningkat, merupakan ancaman dalam keberlanjutan pengembangan agribisnis ayam ras pedaging. Keadaan ini hendaknya menyadarkan berbagai pihak tentang perlunya pemberdayaan subsistem usaha ternak yang merupakan sektor yang mempunyai peran paling sentral dalam produksi daging ayam. Oleh karena itu diperlukan usaha yang dapat memberikan insentif kepada peternak dalam budidaya ayam ras pedaging.
3. Dalam pengembangan agribisnis ayam ras pedaging dan dalam rangka menghadapi perdagangan bebas, beberapa strategi dan kebijakan yang perlu diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi vertikal yang dapat ditempuh dengan kerjasama kemitraan inti-plasma secara tertutup yang didasarkan atas saling membutuhkan dan saling menguntungkan;
- b. Integrasi vertikal perusahaan peternakan dari hulu hingga ke hilir untuk mewujudkan efisiensi, sehingga bisa memasuki pasar ekspor;
- c. Integrasi vertikal yang dilakukan oleh koperasi agribisnis perunggasan. Dalam model ini koperasi secara bertahap mampu menguasai seluruh jaringan agribisnis dari hulu hingga ke hilir dan harus mampu berkompetisi dengan perusahaan swasta. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya koperasi agribisnis perunggasan;
- d. Pengembangan teknologi pakan alternatif dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku sumberdaya domestik, misalnya bungkil kelapa sawit, bungkil kelapa, biji kapuk, buah cherry hutan dan sebagainya. Disamping itu juga meningkatkan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan bahan baku pakan ternak, misalnya penelitian tentang kedele, sorghum, cassava dan lain-lain, sehingga ketersediaan pakan ternak di Indonesia cukup terjamin dengan harga yang mampu bersaing;
- e. Pemantapan adopsi teknologi pembibitan dan budidaya ayam ras melalui pendayagunaan hasil penelitian dalam dan luar negeri yang dikaitkan dengan pelaksanaan pengkajian dan diseminasi melalui kelembagaan Balai Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (BP2TP) yang tersebar di hampir seluruh propinsi di Indonesia.
- f. Pengembangan industri pengolahan (pemotongan, pengemasan, penyimpanan/cool storage) melalui berbagai kebijakan pemerintah, misalnya kredit lunak, penghapusan PPN, kemudahan perijinan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. R. 1996. Keragaan Industri Pakan Ayam Ras di Wilayah Bogor dan Bekasi: Suatu Analisis Efisiensi dan Skala Ekonomi Tesis S2 (tidak dipublikasikan). Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- BPS. 1997. Statistik Industri Besar dan Sedang. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Clayton, E. S. 1977. The Economic of Poultry Industry Longmans. Green and Co. Ltd. London.
- Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat. 1993/1994 – 1997. Laporan Tahunan. Dinas Peternakan Propinsi Dati I. Jawa Barat. Bandung.
- Ditjennak. 1996. Buku Statistik Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan. Jakarta.
- _____. 1997. Buku Statistik Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan. Jakarta.

- _____. 1998. Buku Statistik Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan. Jakarta.
- Departemen Keuangan. 1999. Buku Tarif Bea Masuk Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan. Jakarta
- Gittinger, J.P. 1976. Analisis Ekonomi Proyek-proyek Pertanian. Edisi pertama. Terjemahan Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Gittinger, J.P. 1986. Analisis Ekonomi Proyek-proyek Pertanian. Edisi 1986. Terjemahan. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Handjali, 1982. Analisa Finansial Usahaternak Ayam Pedaging (tidak dipublikasikan). Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Haryono, D. 1991, Keunggulan Komparatif dan dampak Kebijakan Pada Produksi Kedelai, Jagung dan Ubikayu di Propinsi Lampung. Thesis Pasca Sarjana. IPB Bogor.
- Lindert, P. H. dan Ch. P. Kindleberger. 1993. Ekonomi Internasional (Alih bahasa Burhanuddin Abdullah) Edisi Kedelapan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Ming, L.H. 1997. Analisis Perbandingan Efisiensi Usahatani Ayam Ras Pedaging Skala Kecil dan Skala Besar (Studi Kasus pada peternakan ayam ras pedaging di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). Skripsi S1 Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Monkey, E. A. dan S. R. Pearson. 1995. The Policy Analysis Matrix for A Agricultural Development. Cornell University Press, Ithaca and London.
- Samuelson, P. A. dan W. D. Nordhous. 1993. Mikroekonomi. Edisi Keempat Belas. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Saptana dan R. S. Rivai. 1996. Analisa Pemasaran Sarana Produksi Peternakan dan Hasil Ternak Unggas (Suatu kajian pada daerah agribisnis ayam ras di propinsi Jawa Barat). Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Puslitbangnak. Bogor.
- Saptana. 1987. Kelayakan Ekonomis dan Finansial usaha Ternak Ayam Ras Petelur dan Pedaging di Indonesia Ditinjau dari Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Domestik. Skripsi S1 (tidak dipublikasikan). Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Saptana dan S.H. Suhartini. 1995. Agribisnis Ayam Ras Petelur dan Pedaging Melalui Pola Kemitraan di Propinsi Jawa Barat dan Lampung. Prosiding Agribisnis: Peluang dan Tantangan Agribisnis Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Simanjuntak, S. B. 1992. Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Daya Saing Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia. Disertasi Doktor Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Simatupang, P. 1991, The Conception of Domestic Resource Cost and Net Economic Benefit for Comparative Advantage Analysis Agribusiness Division Working Paper No. 2/91, Center for Agro-Socioeconomic Research. Bogor.
- Sinaga, R.S. 1987. Pembangunan Pertanian Sistem Agribisnis dan Perusahaan Inti Rakyat. Ringkasan Kuliah. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Soeprawiro, P., A. P. Siregar dan M. Sabrani. 1980, Teknik Peternakan Ayam Pedaging di Indonesia. Margie Group. Jakarta.

- Sudarsono, S. 1985. Pengantar Teori Mikroekonomi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sudaryani. 1981, Analisa Pendapatan Usahaternak Ayam pedaging di Ciawi Bogor. Skripsi S1 (tidak dipublikasikan). Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sudaryanto, T. dan P. Simatupang. 1993. Arah Pengembangan Agribisnis: Suatu Catatan Kerangka Analisis dalam Prosiding Perspektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Sumaryanto dan I. W. Rusastra. 1991, Analisis Keunggulan Komparatif Industri Pakan Ternak di Jawa dan di Lampung. Jurnal Agroekonomi. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Surono, Y.I. 1997. Analisis Perbandingan Efisiensi Peternakan Ayam Ras Pedaging Skala Kecil dan Skala Besar (Studi Kasus Peternakan Ayam Ras Pedaging di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). Skripsi S1 Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.